

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan”*. Ujung Pandang : Persadi.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- H. Musyair Zainudin. 2011. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta : Ombak.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Ridwan H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ridwan H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- S. F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

W. Riawan Tjandra. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Yudhi Setiawan, dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

## **C. Jurnal**

Agustin Salle. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 1 No. 1

Ichsan Muhajir. 2019. *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol. 4 No.

Indra Simamora. 2018. *Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Meisy Egi Yalti, 2020, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Umi Purwanti, 2021, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. Vol. 3 No. 2

**D. Sumber-sumber lain/Website**

[https://purwodadi.magetan.go.id/portal/berita?id=4490#:~:text=PURWODADI%40MAGETAN.GO.ID,pertanggungjawaban\)%20atas%20tugas%20dan%20wewenang](https://purwodadi.magetan.go.id/portal/berita?id=4490#:~:text=PURWODADI%40MAGETAN.GO.ID,pertanggungjawaban)%20atas%20tugas%20dan%20wewenang). diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 18.56

Boy Yendra Tamin, “Nagari di Sumatera Barat sebagai Wilayah Pemerintahan Terendah dan Perkembangannya”, <https://www.boyyendratamin.com/2016/12/nagari-di-sumatera-barat-sebagai.html>

